**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM
DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2017-2018**

Muhammad Fadillah

Email : muhammadfadillahocu158@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. (0761) 63277

ABSTRAK

Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar sangat penting perannya untuk kemajuannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berkewajiban secara konsisten dalam mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya pengembangan dan pembangunan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata alam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implelementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar belum terlaksana dengan maksimal, komunikasi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar dilakukan dengan cara sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Masih ada kendala yang ditemukan dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, seperti sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sumber daya anggaran, sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII koto Kampar belum dapat terlaksana secara maksimal.

Kata kunci: Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM
DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2017-2018**

Muhammad Fadillah

Email : muhammadfadillahocu158@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. (0761) 63277

ABSTRACT

The policy of the Kampar Regency Tourism and Culture Office in tourism development in Kampar Regency is very important for its progress in supporting the success of national tourism development. The Department of Tourism and Culture of Kampar Regency is obliged to consistently manage the potentials that can be developed, one of which is the development and development of natural tourism in XIII Koto Kampar District, which is expected to improve the welfare of the community. This study aims to determine how the implementation of the policies of the Kampar Regency Tourism and Culture Office in the development of natural tourism in XIII Koto Kampar District and to determine the inhibiting factors in the development of natural tourism.

This research use descriptive qualitative approach. Then the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique was carried out by collecting information through interviews, data reduction and data presentation.

The results of this study indicate that the implementation of policies carried out by the Department of Tourism and Culture of Kampar Regency in the development of natural tourism in the XIII Koto Kampar District has not been carried out optimally, the communication carried out in the development of natural tourism in the XIII Koto Kampar District is carried out by means of socialization and promotion to the community. . There are still obstacles found in the development of natural tourism in the XIII Koto Kampar District, such as inadequate human resources both in terms of quality and quantity, limited budget resources, so that the implementation of policies in the development of natural tourism in XIII Koto Kampar District has not been implemented properly maximum.

Keywords: Policy, Communication, Resources

A. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi pemerintah saat ini dalam rangka meningkatkan perekonomian yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pariwisata yang baik akan menambah salah satu pemasukan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2009¹ tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melihat peranan yang begitu besar maka pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata sangat penting perannya untuk kemajuannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Pengembangan di wilayah objek wisata memberikan dampak positif apabila dikelola dengan profesional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

Kepariwisata dan Kebudayaan, sesuai dengan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah menjabarkan dalam suatu Rencana Program Rencana Strategis yaitu Program Jangka Menengah tahun 2017 – 2022.

Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki pariwisata alam yang sangat indah. Namun objek wisata alam yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar tersebut belum dikembangkan secara optimal baik oleh masyarakat disekitar objek pariwisata, pengelola, serta pemerintah setempat. pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya di objek pariwisata alam Kecamatan XIII Koto kampar seperti sarana informasi, sulitnya angkutan umum untuk mencapai lokasi di beberapa objek wisata alam, dan jalan menuju objek wisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar yang belum memadai. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Daerah memperhatikan berbagai fasilitas pendukung pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, dengan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata alam yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Adapun kebijakan pengembangan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar terdiri dari:²

1. Pembangunan pariwisata dan Kebudayaan dilakukan dengan mengembangkan dan

¹ Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

²Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018. Hal 15-16

mendayagunakan sumber dan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperluas dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan nilai-nilai sportifitas. Dalam pembangunan pariwisata tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa di daerah serta kelestarian mutu lingkungan.

2. Dalam rangka pembangunan pariwisata dan Kebudayaan perlu ditingkatkan langkah-langkah terarah dan terpadu dalam pengembangan objek wisata, kegiatan promosi pelatihan pramuwisata, penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, Kebudayaan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pariwisata, event Kebudayaan.
3. Peningkatan kemampuan para pengelola objek wisata, pengusaha jasa wisata dan pemandu wisata serta pengurus organisasi Kebudayaan.
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, Kebudayaan perlu ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan kelompok-kelompok sadar wisata, industri kerajinan, organisasi Budaya. Oleh karena itu perlu dicegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat serta kepentingan pertahanan dan keamanan.
5. Pengembangan potensi wisata, Budaya daerah melalui perbaikan sarana dan prasarana, penataan

kawasan, pengembangan kegiatan wisata di masyarakat.

Dari lima kebijakan diatas dalam pengembangan sarana, prasarana dan peningkatan sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Kampar tersebut, dalam implementasi kebijakan masih belum optimal dan terdapat beberapa kekurangan. Salah satu potensi pariwisata alam yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar saat ini yaitu kawasan wisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, Untuk mencapai itu tentu saja dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat agar selalu tercipta kesinambungan antara stakeholder terkait.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan suatu pariwisata. Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga masih belum memadai baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Pendidikan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam segi pendidikan belum begitu baik. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar saat ini tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar tidak berjalan dengan baik. Tidak di pungkiri bahwa hampir seluruh Indonesia memiliki potensi pariwisata, maka yang perlu di perhatikan adalah keadaan sumberdaya yang berperan dalam pengembangan pariwisata alam, baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana dan prasarana pariwisata lainnya

Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana penunjang sangat diperlukan untuk kenyamanan wisatawan. Minimnya sarana prasarana penunjang di objek pariwisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar seperti toilet umum dan sarana prasarana lainnya. Selain itu sumber daya anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar khususnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar sangat minim, hal ini membuat pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar tidak berkembang dengan maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sarana prasarana, sumber daya yang ada maupun promosi sebagai alat komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan masyarakat setempat untuk kemajuan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan diharapkan pula kreatifitas, partisipasi masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar untuk menunjang keberhasilan dalam pengembangan sektor pariwisata alam. Adapun identifikasi masalah yang penulis temui berdasarkan fenomena diatas yaitu:

1. Belum optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam bentuk komunikasi promosi, penggunaan teknologi informasi, sebagai media komunikasi objek wisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Sehingga masih banyak

pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar yang tidak diketahui oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

2. Permasalahan pariwisata alam di Kecamatan XIII saat ini sangat erat hubungannya dengan sumber daya. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga masih minim baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Selain itu sumber daya anggaran yang dimiliki untuk pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar sangat minim. Serta belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana yang ada di pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Atas penjelasan-penjelasan di atas, menarik bagi penulis meneliti "**Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2017-2018**". Penelitian ini ingin mencari bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, baik itu dalam bentuk program, kebijakan, pembangunan dan rehabilitasi.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Pengembangan Pariwisata Alam di Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2017-2018?

C. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye (1992), “public policy is whatever governments choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).³ William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁴

2. Implementasi Kebijakan

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III terdapat 4 Variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:⁵

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari

implementasi kebijakan publik. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik. Maka Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi:⁶

- 1) Dimensi transmisi
- 2) Dimensi kejelasan
- 3) Dimensi konsistensi

b. Sumberdaya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi staf, sumberdaya anggaran, fasilitas dan sumberdaya kewenangan.⁷

c. Disposisi

Edward III mengemukakan “kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya hanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar dalam implementasi kebijakan yang akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap satu implementasi kebijakan karena konflik

³Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Hal 35.

⁴William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003), Hal 132.

⁵ Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal 149.

⁶Agustino, Leo, *Op. Cit.* Hal 150.

⁷Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media, 2010), Hal 98.

kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.⁸

d. Struktur birokrasi

Mulyadi menyatakan struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan.⁹

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, media massa dan dokumen. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

E. Pembahasan

Komunikasi dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Komunikasi merupakan faktor penting agar berjalannya sebuah organisasi/ lembaga termasuk untuk sosialisasi visi dan misi,

strategi, serta arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Komunikasi sebagai penghubung antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan baik itu antar lembaga pemerintah dengan lembaga lain seperti dunia usaha pariwisata, demikian juga untuk menjalin interaksi personal dengan pelaku-pelaku pariwisata di Kecamatan XIII Koto Kampar dalam menyatakan keinginan dan rencana pelaksanaan program pariwisata.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan dan mempromosikan tentang implementasi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan objek pariwisata alam khususnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di objek pariwisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar. Kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Transmisi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar pelaksana kebijakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mensosialisasikan tentang kebijakan pengembangan pariwisata kepada masyarakat yang berada di objek pariwisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar. transmisi komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan cara rapat koordinasi antara pelaksana kebijakan.

⁸ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), Hal 197.

⁹Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal 29.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan program-program pengembangan pariwisata dan monitoring pada program yang telah dilakukan dan menyelesaikan apabila terdapat masalah teknis dilapangan dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

Kejelasan informasi berperan penting untuk menunjang kelancaran informasi komunikasi antara kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan bagian-bagiannya serta masyarakat di objek pariwisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar. Dari sisi komunikasi pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui promosi dan melaksanakan berbagai macam event di pariwisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar.

Tabel 3.1 Event di Pariwisata Alam XIII Koto Kampar

No	Event Pariwisata	Lokasi
1	Mahligai Festival	Objek Wisata Alam Tepian Mahligai
2	Kampar International Dragon Boat	Danau Rusa

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

model komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam mengkomunikasikan objek pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar meliputi:

1. Direct marketing, merupakan komunikasi yang memanfaatkan suatu media untuk menimbulkan respon yang mana langsung ditujukan kepada masyarakat atau konsumen individual, melalui internet, website dan seluruh media sosial.
2. Personal selling, yaitu berkomunikasi langsung antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan wisatawan dan masyarakat. Seperti melaksanakan event Dragon Boat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dipariwisata alam Danau rusa

Selain itu promosi objek pariwisata juga terbantu oleh masyarakat yang saat ini aktif aktif dalam menggunakan media sosial. Semakin banyak masyarakat yang mengunggah foto ke media sosial menjadikan objek pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar juga ikut berkembang.

Sumber Daya yang Terlibat Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Kecamatan XIII Koto Kampar

Sumber daya adalah perangkat mutlak dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang di pimpin oleh Kepala Dinas, yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

Majunya suatu wisata tentunya tidak lepas dari sumberdaya yang berkompeten

didalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Namun masalah utamanya sering terletak di sumber daya manusia yang terlibat.

1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengembangan dan pembangunan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Sebagaimana Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Kampar, kondisi saat ini Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar juga masih minim baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga merupakan faktor utama agar organisasi dapat berjalan secara optimal.

Adapun jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah:

Tabel 3.2 Data Jumlah Pegawai ASN dan UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina TK I	IV/b	2 Orang
3	Pembina	IV/a	3 Orang
4	Penata	III/d	11

	Tingkat I		Orang
5	Penata	III/c	5 Orang
6	Penata Muda TK I	III/b	5 Orang
7	Penata Muda	III/a	2 Orang
8	Pengatur TK I	II/d	1 Orang
9	Pengatur	II/c	1 Orang
10	Pengatur Muda TK I	II/b	2 Orang
11	Pengatur Muda	II/a	2 Orang
Jumlah Pegawai			35 Orang

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, staf dibantu oleh sekretaris yang terdiri dari tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL). Pola perekrutan staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar belum sesuai dengan kompetensi staf dalam melaksanakan pengembangan khususnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Dari data PNS selanjutnya adalah data jumlah pegawai tidak tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti data dibawah ini:

Tabel 3.3 Data Pegawai Tidak Tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Harian Lepas (THL)	16 Orang
2	Petugas Teknis Lapangan	4 Orang
3	Petugas Kebersihan	2 Orang
4	Petugas Teknis	6 Orang

	Lapangan	
	Jumlah THL	28 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017

Implementasi kebijakan yang maksimal atau efektif dan efisien mengindikasikan perlunya sumber daya yang cukup memadai. Perlunya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta kurangnya komitmen dan profesional kerja pegawai dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata mengindikasikan terbatasnya sumber daya manusia maupun sumber anggaran.

Komitmen dan profesionalisme pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar serta instansi lain yang ada di Kabupaten Kampar perlu ditingkatkan agar mampu mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata yang telah dibuat, dimana hal tersebut menjadi kekuatan pendorong pembangunan yang lain karena sumber daya yang lain seperti sumber daya anggaran, fasilitas atau peralatan dan sumber daya kewenangan hanya merupakan penunjang sekalipun penting, namun yang terpenting adalah sumber daya manusia itu sendiri.

2. Sumber Daya Anggaran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai organisasi sektor publik yang bertanggung jawab penuh melaksanakan pengembangan dan pembangunan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar harus memiliki anggaran yang

cukup agar tercapainya suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumberdaya anggaran ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata di Kabupaten Kampar. Apabila dana yang dialokasikan besar maka implementasi kebijakan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun apabila anggaran yang dialokasikan minim maka kebijakan sulit tercapai dan tidak akan berhasil. Dalam penelitian ini anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah untuk pengembangan pariwisata di kabupaten Kampar sangat terbatas.

Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Menurut hasil observasi peneliti fasilitas yang ada di pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar sudah cukup baik. Namun terdapat beberapa sarana dan prasarana objek pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar yang harus ditingkatkan lagi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar belum bisa melakukan pengembangan berupa pembangunan fisik di objek wisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar karena masih dikelola sepenuhnya oleh masyarakat maupun swasta sehingga tidak bisa melakukan pengembangan fisik dengan dana Pemda. Pada tahun 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah membangun ataupun menyelesaikan pembangunan 5 unit sarana dan prasarana untuk pengembangan di Wisata Alam di Kecamatan XIII Koto Kampar tepatnya di objek wisata alam Danau Rusa, mengetahui lebih jelasnya sebagai berikut:

**Tabel 3.5 pengembangan Wisata Alam
XIII Koto Kampar Tahun 2018**

No	Sarana / Prasarana Pariwisata	Jumlah
1	Pembangunan Talud di Objek Wiasata Danau Rusa	1 unit
2	Pengembangan Gazebo di Objek Wisata Danau Rusa	4 unit

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Kab.
Kampar Tahun Anggaran 2018*

1. Sumber daya Kewenangan

Kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar menjadikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai leading sector implementasi. Dalam hal ini, Bupati Kabupaten Kampar telah mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata dan Kabupaten Kampar melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Bisa diketahui bahwa wewenang dan segala hal yang melekat (tugas, fungsi dan sebagainya) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah sesuai dengan tugas yang diberikan sebagai leading sector implementasi kebijakan pariwisata. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata alam di Kecamatan XIII.

3.1.3 Disposisi Yang Dijumpai Dalam Mengimplementasikan Kebijakan

Pengembangan Pariwisata Alam di Kecamatan XIII Koto Kampar

Disposisi merupakan sikap pelaksana atau karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana (implementor). Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan pengembangan pariwisata khususnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut.

Proses disposisi dalam implementasi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program kerja, diawali dengan penyusunan program berdasarkan keadaan riil mengenai pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Penyampaian ide-ide strategis menjadi simbol berlangsungnya disposisi dari dan kearah pelaksanaan yang diikuti dengan pemahaman lingkungan dan potensi yang dimiliki. Setiap implementor perlu mengkoordinasikan penjabaran program hingga tahap evaluasi karena itu implementor memerlukan kewenangan, informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dan transparan dan terus menerus antara bidang-bidang atau satuan-satuan agar dapat memberikan diagnosa masalah –masalah dan usulan solusi.

Menurut observasi peneliti sikap yang ditunjukkan oleh beberapa pegawai terlihat positif, sikap positif yang ditunjukkan berdasarkan kesungguhan para pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya dan patuh terhadap perintah Kepala Dinas. Penetapan staf yang terjadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar belum baik. Penetapan staf pada umumnya berdasarkan lulusan Pegawai Negeri Sipil, namun penetapan staf tersebut tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga pemahaman staf dalam pengembangan pariwisata khususnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar kurang dimiliki oleh staf tersebut. Hal ini menyebabkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar khususnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar kurang berjalan dengan baik

3.1.4 Struktur Birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata Alam di Kecamatan XIII Koto Kampar

Struktur organisasi di sebuah instansi mengatur tata aliran pekerjaan pegawai agar masing-masing pegawai memiliki tugas serta tidak lagi mencampuri tugas-tugas lainnya. Agar proses dalam birokrasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dalam implementasi kebijakan disebut *standar operation procedur* (SOP) yang menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar, tidak ada

SOP khusus yang mengatur pariwisata alam yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar, dimana hanya berpedoman berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Menurut pandangan peneliti mengenai SOP yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar masih kurang efektif, karena tidak ada standar operasi khusus dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Hal ini mengakibatkan lambat dan kurang berkembangnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, garis perintah tampak di dalam struktur organisasi yang memberikan gambaran bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar menetapkan kebijakan yang kemudian dijalankan oleh bidang-bidang dibawahnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan teruraikan dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai seluruh urusan yang mencakup tentang pariwisata di Kabupaten Kampar termasuk pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar harus

ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas secara umum.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti bahas pada BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dari segi komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar belum berjalan dengan baik. Sumberdaya manusia atau pelaksana kebijakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dari segi kualitas maupun kuantitas belum terpenuhi dengan maksimal. Kemudian sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sangatlah minim. Sedangkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di objek pariwisata alam Kecamatan XIII Koto Kampar cukup baik. Selanjutnya, Sikap Pelaksana di Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah cukup baik karena para staf melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah kepala dinas namun penetapan Staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar belum baik. Kemudian, tidak ada standar operasi khusus dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar. Hal ini mengakibatkan lambat dan kurang

berkembangnya pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melakukan komunikasi ke sasaran kebijakan yaitu masyarakat sehingga komunikasi implementasi kebijakan pengembangan objek pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar berjalan dengan baik. Kemudian dari segi sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar harus lebih ditingkatkan lagi agar dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar dapat berjalan dengan baik. Kemudian diharapkan adanya standar operasi khusus dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo, 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan, 2015. Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social Lainnya. Jakarta: Media Group.
- Edi Suharto, 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Marzuki. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

- Mulyadi, Deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sahya Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber Silalahi, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wandi Sustiyo, 2013. *Journal Of Phisical Education, Sport Health and Reactcrations*. Universitas Negri Semarang.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- William N. Dunn, 2003. *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Artikel Ilmiah:**
- Berkahti, Shintarani. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selat Baru Kabupaten Bengkalis*. (Pekanbaru: Universitas Riau, 2015).
- Dwi Baskoro, Januar. 2018. dalam Tesisnya *“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Demartoto, Argyo dalam jurnal *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pedesaan Oleh Pelaku Wisata di Kabupaten Boyolali*. Hlm. 17-2.
- Kristin Simamora, Rotua dan Rudi Salam Sinaga. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016): 79-96.
- Olan Hutapea, Benni. 2017. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Prasetyo, Putro. 2013. *Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2013: 151-164.
- Rahmawati Hrp, Anggi. 2015. *Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Danau Kayangan Kota Pekanbaru Tahun 2010-2012*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kampar